BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori Keagenan (*Agency Theory*) "Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen" (Ross, Westerfield, Jaffe, 2010:13). Teori ini memiliki asumsi bahwa konflik kepentingan ditimbulkan oleh masing-masing individu dari prinsipal dan agen yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Praktik pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas beban APBD merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Perangkat Daerah atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan Kepala Daerah dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah yang membuat ketentuan dan peraturan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bertindak sebagai prinsipal.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, yang salah satunya mengedepankan pentingnya ketepatan waktu (*timeliness*), maka agar dapat dihasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, input yang berasal dari berbagai dokumen sumber, salah satunya adalah surat pertanggungjawaban pengeluaran juga harus disampaikan secara tepat

waktu.

Sehubungan dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD, Pasal 220 Ayat 10 Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dan Ayat 11 10 Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat 10 dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah seperti yang disyaratkan tersebut di atas, maka sebagai penanggung jawab keuangan daerah atau pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang dijabat oleh Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan sebegai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, seorang kepala daerah tidak dapat dengan mudah dan tepat waktu menyampaikan pertanggungjawaban tentang keadaan keuangan daerah. Yang menjadi hambatan utama dalam penyampaian laporan keuangan seperti yang ditentukan dalam peraturan tersebut adalah

keterlambatan laporan realisasi anggaran penggunaan dana dari setiap unit kerja. Keterlambatan pertanggungjawaban salah satu instansi berarti akan membawa akibat pada keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah.

Adapun masalah yang terkadang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja dalam hal ini terdapat masalah dalam sumber daya manusia yang kurang pelatihan dan kompeten, masih kurangnya pengetahuan akan teknologi informasi dan pengendalian intern yang masih kurang optimal dalam unit satuan kerja di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada berita beritasatu.com – Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menyatakan, upaya Pemerintah Provinsi DKI belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kesiapan implementasi SAP berbasis akrual. Hal tersebut diungkap saat BPK Perwakilan DKI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Lingkup

pemeriksaan mencakup komitmen, regulasi dan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi serta pengelolaan teknologi informasi. Ada tiga aspek permasalahan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ketiga aspek itu adalah aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, aspek pengelolaan SDM dan aspek teknologi informasi.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Pamakai informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan secara cepat dan tepat waktu agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan dan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Oleh karena itu ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan faktor penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai

dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu.

Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. "Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya" (Trisiana, 2017).

Sumber daya manusia merupakan individu aktif yang senantiasa produktif diberbagai kegiatan operasional organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang berperan sebagai penentu dan penggerak pencapaian tujuan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Basna (2020) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan surat pertanggunjawaban keuangan menemukan bahwa sumber daya manusia terbukti berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggunjawaban. Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Mardiana (2020) bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

Teknologi merupakan sebuah bentuk perubahan yang dapat membantu kinerja sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Teknologi informasi saat

ini merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi dalam membantu kinerja organisasi dan individu.

Menurut Febriyanti (2018) teknologi informasi merupakan suatu tata cara atau sistem yang digunakan untuk membantu menyimpan informasi memproses, dan kemudian menyampaikan atau mengkomunikasikan informasi tersebut dalam bentuk multimedia yang disalurkan melalui bantuan komputer.

Sedangkan menurut Astuti (2019) "teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memproses suatu informasi yang bersifat finansial maupun non finansial".

Penelitian yang dilakukan Roro Fitriani (2016) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja menemukan bahwa pemanfaatan teknologi terbukti berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggunjawaban. Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan A. Abd. Waris Yunus (2021) bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu surat pertanggungjawaban.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah "proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai".

Penelitian yang dilakukan Agung Muhammad Arighi (2020) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern menemukan bahwa pengendalian intern terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keteparan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: "**Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Belanja (Studi Kasus Pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja?

4. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja.
b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja.
c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja.
d. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Sebuah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi sektor publik.

2) Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian sebelumnya serta sebagai sumber referensi dan informasi untuk studi lebih lanjut terkait faktor penghambat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai wahana pelatihan dan studi banding antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan praktek yang diterapkan di Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki unit kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai "Analisis faktor penghambat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat".

2) Bagi Pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban belanja agar lebih mengerti dan memahami faktor penghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja tersebut.

3) Bagi pembaca

Memberikan informasi dan bahan referensi untuk memperbaiki atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
USNI
YAYASAN ABDI KARYA